

Siaran Pers

MUSRENBANGPROV JAWA TIMUR: MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS MINTA JAWA TIMUR JAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN EMPAT SEKTOR

SURABAYA (12/04) – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro memberikan arahan dalam acara Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Jawa Timur yang mengusung tema “Memacu Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur”, untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur 2018 pada Rabu (12/04), di Grand City Mall & Convex Surabaya. Dalam sambutannya, Menteri Bambang memberikan beberapa penekanan penting terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan di empat sektor utama. “Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada 2018 sebesar 5,4 - 6,1 persen, maka pertumbuhan wilayah Jawa diharapkan tumbuh 5,63 persen, dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur khususnya diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,61 - 5,96 persen. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur perlu didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dengan kontribusi total sebesar 70,16 persen,” jelas Menteri Bambang.

Proyeksi di atas yang dirilis Kementerian PPN/Bappenas dalam Rancangan Awal RKP 2018 ini, didasarkan pada data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Jawa Timur. Selama enam tahun berturut-turut (2010-2015), sektor yang memiliki peranan dan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur adalah sektor Industri Pengolahan (*share* tahun 2015 sebesar 29,27 persen), diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran (*share* 17,64 persen), sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (*share* 13,75 persen), dan sektor Konstruksi (*share* 9,50 persen). “Sektor-sektor ini harus ditingkatkan peranannya terhadap pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja Jawa Timur,” kata beliau.

Dari hasil simulasi Kementerian PPN/Bappenas untuk RKP 2018, sektor Industri Pengolahan ditargetkan tumbuh 5,1 – 5,7 persen, dengan *share* 20,8 - 21,0 persen. Sektor Perdagangan ditargetkan tumbuh 5,6 – 6,3 persen, dengan *share* 13,2 persen. Sementara sektor pertanian dan sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 3,6 – 4,0 persen dan 7,7 – 8,4 persen, dengan *share* 12,8 – 12,9 persen dan 11,3 – 11,4 persen.

Kementerian PPN/Bappenas menyadari untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tersebut memerlukan kerja keras dan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satunya dengan melakukan penajaman Prioritas Nasional (dari yang sebelumnya 23 Prioritas Nasional untuk RKP 2017 menjadi 10 Prioritas Nasional untuk RKP 2018), serta mendorong investasi swasta pada proyek-proyek infrastruktur dalam Prioritas Nasional yang dapat meningkatkan produktivitas nasional. “Sepuluh Prioritas Nasional harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan, serta Proyek Prioritas, dan tentunya juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui pembagian Urusan Wajib dan Pilihan,” kata Menteri Bambang.

Sesuai tema RKP 2018, yaitu “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”, Pemerintah Provinsi Jawa Timur didorong membangun beberapa proyek prioritas nasional yang sekaligus

mendukung beberapa Prioritas Nasional. Lebih lanjut Menteri Bambang menjelaskan apa saja proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VIII: Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman. “Pembangunan Jalur Ganda Lintas Solo-Surabaya antara Madiun-Jombang (SBSN) dan Kedungbanteng-Madiun (SBSN); Pembangunan Jalan Tol yang meliputi Jalan Tol Pandaan-Malang, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Gempol-Pasuruan; Pembangunan Jalan Non Tol *Fly Over* dari dan menuju Teluk Lamong; dan Peningkatan Kapasitas atau Rekonstruksi Jalan Kertosono-Mantingan dan Kertosono-Kediri, merupakan proyek-proyek untuk mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional,” jelas Bambang.

Disamping itu, proyek-proyek yang mendukung Prioritas Nasional ke-VI: Ketahanan Pangan, antara lain: pembangunan Bendungan Tugu, Semantok (Kabupaten Nganjuk), Gongseng, Tukul dan Bagong. Sementara proyek pembangunan kilang minyak Tuban untuk mendukung Prioritas Nasional ke-V: Ketahanan Energi, serta Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di lima Kabupaten/Kota untuk mendukung Prioritas Nasional ke-III: Perumahan Permukiman. Diharapkan berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur tersebut dapat mengatasi permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Timur.

Terkait pendanaannya, salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal adalah dengan mengembangkan mekanisme pembiayaan non konvensional, seperti skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINAN) yang melengkapi skema pembiayaan infrastruktur yang telah ada, yaitu skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP). Menurut Menteri Bambang, skema-skema alternatif tersebut perlu didorong dan didukung semua pihak guna memacu percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia.

Sebagai pesan penutup, Menteri Bambang menekankan pentingnya peranan Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah, serta memperkuat perencanaan spasial agar sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. “Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, namun berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan. Untuk itu diharapkan dalam pembahasan dengan OPD dalam Musrenbangprov ini, dapat dilakukan pendekatan *Money Follows Program* dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya,” tegas beliau. Sementara untuk pembahasan dengan Kabupaten/Kota, dilakukan dengan pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan Prioritas Nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek Prioritas Nasional.

Turut hadir dalam acara Musrenbangprov Jawa Timur ini Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo, Gubernur Provinsi Jawa Timur Soekarwo, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur H. Abdul Halim Iskandar, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Jawa Timur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Jawa Timur, Pimpinan OPD Provinsi Jawa Timur, tokoh masyarakat, akademisi, wakil organisasi masyarakat, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. ■

Jakarta, 12 April 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon (021) 31936207, 3905650; Faksimile (021) 3145374
Email: humas@bappenas.go.id